



# **KERANGKA ACUAN KERJA (K A K)**

**KEGIATAN :  
PENINGKATAN KUALITAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN  
BUMD BIDANG KEUANGAN**

**BIRO PEREKONOMIAN  
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH  
2020**

## **I. KETENTUAN UMUM**

- Nama Kegiatan : Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan BUMD Bidang Keuangan
- Sumber Pendanaan : APBD Provinsi Jawa Tengah pada Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- Besar Anggaran : Rp.400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah)
- L o k a s i : BUMD Provinsi, Kabupaten/Kota di Jawa Tengah serta luar provinsi
- Nama Pengguna Anggaran : Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

## **II. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sejalan dengan menguatnya pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Pusat mendorong Pemerintah Daerah untuk terus meningkatkan kontribusi PAD dalam pembiayaan pembangunan di daerah. Berdasarkan Permendagri No. 13/2006, PAD terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. PAD meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dana perimbangan merupakan dana yang berasal dari Pemerintah Pusat sedangkan lain-lain pendapatan yang sah meliputi dana-dana bantuan.

Kebijakan anggaran Pemerintah sekarang dan ke depan, subsidi akan dikurangi secara perlahan. Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah tidak dapat sepenuhnya mengandalkan Pemerintah Pusat. Dengan demikian peran PAD harus makin meningkat. Dengan subsidi Pusat yang makin berkurang, dan sesuai dengan semangat otonomi daerah, PAD akan menjadi sumber utama pendapatan Daerah. Porsi PAD yang lebih besar akan membuat struktur anggaran lebih sehat dan Daerah menjadi lebih mandiri serta lebih leluasa melaksanakan pembangunan.

Ke depan, komponen PAD yang berupa pajak daerah dan retribusi daerah akan semakin sulit ditingkatkan karena akan membebani masyarakat. Maka deviden dari BUMD seharusnya dapat menjadi andalan, menyumbangkan porsi yang lebih besar dalam PAD. Untuk itulah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai pemegang saham perlu melakukan pembinaan terhadap BUMD yang dimilikinya, agar kinerja BUMD semakin meningkat dan menjadi penyumbang PAD yang dapat diandalkan.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah melaksanakan kegiatan kegiatan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang keuangan dalam rangka memantau dan mengevaluasi kinerja BUMD agar tercapainya laba sesuai dengan target yang ditetapkan.

Selain hal tersebut, kegiatan ini juga merupakan fasilitasi upaya pemecahan masalah masing-masing BUMD/BUMN dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas perusahaan menuju BUMD/BUMN yang sehat serta peningkatan setoran PAD dan mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat.

## **C. SASARAN**

Sasaran Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan BUMD Bidang Keuangan Tahun 2020 adalah PD BPR BKK, PD BKK dan PT Bank Jateng yang merupakan lembaga bisnis milik Daerah yang diharapkan dapat meningkatkan PAD serta menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

## **D. BENTUK KEGIATAN**

Kegiatan Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan BUMD Bidang Keuangan terdiri dari beberapa sub kegiatan yaitu:

1. Penghitungan dan Pengesahan hasil usaha 2019 BUMD Bidang Keuangan.
2. Evaluasi Kinerja triwulanan Tahun 2020 BUMD Bidang Keuangan.
3. Fasilitasi Penyusunan dan Pengesahan RKAT 2020 BUMD Bidang Keuangan.
4. Monitoring lapangan BUMD Bidang Keuangan.
5. Bintek Evaluator.

## **E. TUJUAN DAN OUTPUT :**

1. Kegiatan Penghitungan dan Pengesahan Hasil Usaha Tahun 2019 BUMD Bidang Keuangan.
  - Penghitungan Hasil Usaha Tahun 2019 BUMD Bidang Keuangan.
    - a. Tujuan :  
Melaksanakan fasilitasi RUPS perhitungan hasil usaha Tahun 2019 BUMD Bidang Keuangan.
    - b. Output :  
Terlaksananya fasilitasi RUPS perhitungan hasil usaha Tahun 2019 BUMD Bidang Keuangan.
  - Kegiatan Pengesahan Hasil Usaha Tahun 2019 BUMD Bidang Keuangan.
    - a. Tujuan :  
Melaksanakan fasilitasi RUPS pengesahan hasil usaha Tahun 2019 BUMD Bidang Keuangan.

- b. Output :  
Terlaksananya fasilitasi RUPS pengesahan hasil usaha Tahun 2019 BUMD Bidang Keuangan.
  
- 2. Evaluasi Kinerja triwulanan Tahun 2020 BUMD Bidang Keuangan
  - a. Tujuan :  
Memantau capaian kinerja BUMD Bidang Keuangan sampai dengan Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III dan Triwulan IV tahun 2020.
  - b. Output :  
Terpantaunya capaian kinerja BUMD bidang Keuangan sampai dengan Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III dan Triwulan IV tahun 2020.
  
- 3. Fasilitasi Penyusunan dan Pengesahan RKAT 2020 BUMD Bidang Keuangan.
  - Penyusunan RKAT 2020 BUMD Bidang Keuangan
    - a. Tujuan :  
Mengetahui tingkat rasionalitas dengan optimalisasi potensi dalam penyusunan RKAT 2020 dan mengukur tingkat keyakinan Direksi dalam pencapaiannya.
    - b. Output :  
Tersusunnya RKAT Tahun 2020 yang rasional dan optimal.
  - Pengesahan RKAT 2020 Bidang Keuangan
    - a. Tujuan :  
Mengesahkan RKAT Tahun 2020 sebagai pedoman dalam operasional perusahaan.
    - b. Output :  
Terlaksananya pengesahan RKAT Tahun 2020.
  
- 4. Kegiatan Monitoring lapangan BUMD Bidang Keuangan
  - a. Tujuan :
    - 1) Melakukan evaluasi kinerja terhadap BUMD Bidang Keuangan
    - 2) Mengidentifikasi permasalahan yang ada di BUMD Bidang Keuangan
  - b. Output :
    - 1) Terlaksananya evaluasi kinerja terhadap BUMD Bidang Keuangan
    - 2) Terlaksananya identifikasi permasalahan yang ada di BUMD Bidang Keuangan
  
- 5. Kegiatan Bintek Evaluator
  - a. Tujuan :  
Meningkatkan kualitas SDM Pemerintah Kab/Kota khususnya dalam pengawasan terhadap BUMD Bidang Keuangan dan memberikan pengetahuan bagi peserta untuk memahami, menilai dan mengevaluasi laporan RKAT yang disampaikan Direksi serta memberikan pembekalan kepada peserta dalam rangka pembinaan dan pengawasan.

b. Output :

Terlaksananya peningkatan kualitas dan kompetensi evaluator BUMD Bidang Keuangan untuk mengimplementasikan fungsi pengawasan yang telah direncanakan dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditentukan.

**F. JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN**

Kegiatan Koordinasi BUMD dilaksanakan pada bulan Januari – Desember 2020 dengan lokasi di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah

**G. PEMBIAYAAN**

Sumber pembiayaan adalah APBD Provinsi Jawa Tengah pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.400.000.000,- (empat Ratus Juta Rupiah).

Semarang, Mei 2020

KEPALA BIRO PEREKONOMIAN



**EDDY S. BRAMIYANTO, SE, MM** ✓

Pembina Tingkat I

NIP. 19660611 198602 1 001